

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

Ricky Tona¹, Yulifati Laoli², Rini Indahwati³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Medan

E-mail : rickyhaloho78@gmail.com¹, yulifatilaoli@polmed.ac.id²,

riniindahwati@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Perencanaan yang berkualitas diperlukan agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik yang didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Namun masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dapat menghambat tercapainya perencanaan pembangunan yang efektif termasuk data yang ada pada BAPPEDA Pemerintah Kota Sibolga. Oleh karena itu Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD adalah sebuah sistem yang dibuat sebagai wujud pemanfaatan dan merealisasikan teknologi dalam perencanaan. Implementasi SIPD peneliti analisis melalui teori implementasi dari George C. Edward yang bertujuan untuk mengetahui implementasi SIPD terhadap efektivitas perencanaan pembangunan daerah pada Pemerintah Kota Sibolga serta mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dari pelaksanaan kebijakan SIPD di BAPPEDA Pemerintah Kota Sibolga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dengan pendalaman wawancara informan yang diawali dengan pembagian kuesioner sebagai langkah awal dalam pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SIPD yang di terapkan BAPPEDA Pemerintah Kota Sibolga menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif. Hal tersebut diukur melalui proses penyusunan dokumen perencanaan, 3 indikator efektivitas perencanaan pembangunan dari BAPPEDA, serta empat faktor yang mempengaruhi implementasi dari teori Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Meskipun begitu, terdapat faktor penghambat dalam mengimplementasikan SIPD yaitu sumber daya manusia yang kurang berkompeten, Sering terjadinya pengangkatan Birokrasi, serta fasilitas mengenai jaringan yang kurang stabil dan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat.

Kata Kunci: Implementasi, SIPD, Efektivitas Perencanaan, BAPPEDA Pemerintah Kota Sibolga.

ABSTRACT

Quality planning is needed so that development can be carried out properly, supported by the availability of complete and accurate data and information. However, the limited availability of Therefore, the Central Government issued a Regional Government Information System (SIPD) policy in the Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019. SIPD is a system created as a form of utilization and realization of technology in planning. The implementation of SIPD by researchers analyzes through the implementation theory of George C. Edward which aims to determine the implementation of SIPD on the effectiveness of regional

development planning in the Sibolga City Government and to determine the factors that support and inhibit the implementation of SIPD policies in the BAPPEDA of the Sibolga City Government. accurate data and information can hinder the achievement of effective development planning, including data available at the BAPPEDA of the Sibolga City Government. The method used in this study is descriptive qualitative with a case study approach with in-depth interviews with informants which began with the distribution of questionnaires as the initial step in data collection. It can be concluded that the implementation of the SIPD policy applied by the BAPPEDA of the Sibolga City Government results in effective development planning. This is measured through the process of preparing planning documents, 3 indicators of the effectiveness of development planning from BAPPEDA, and four factors that influence the implementation of Edward III's theory, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Even so, there are inhibiting factors in implementing SIPD, namely less competent human resources, frequent bureaucratic appointments, and facilities regarding unstable networks and changes in the nomenclature of programs, activities and Sub-Activities implemented by the Central Government.

Keywords: *Implementation, SIPD, Planning Effectiveness, BAPPEDA Sibolga City Government.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar setiap daerah yang terdapat di Indonesia ini, termasuk Pemerintah Kota Sibolga wajib menyusun perencanaan pembangunan daerahnya. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud terdiri dari Perencanaan Jangka Panjang 20 tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah untuk 5 tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek atau Tahunan (RKPD).

Penyusunan perencanaan daerah didukung oleh ketersediaan informasi pemerintah daerah, hal tersebut telah diatur pada pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah (Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah) yang telah dikelola dalam SIPD

(Ruhana,2017), begitu juga pada Pasal 144 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang telah dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Atas ketentuan di atas, maka pemerintah terpacu untuk berinovasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk pengganti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Penerapan SIPD diharapkan mampu menyatukan persepsi mengenai pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang tepat dan menjadi sarana dalam mengintegrasikan serta mensinergikan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai wujud penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah menjadi lebih cepat, inovatif dan berkualitas. Hal tersebut selaras dengan Nasution dan Nurwani (2021),

mengungkapkan bahwa diharapkan dengan memperluas inisiatif pembangunan di semua sektor akan memungkinkan transmisi informasi yang sempurna dan partisipasi yang luas untuk semua orang, sedangkan menurut Maurits (2023) menjelaskan bahwa SIPD dibuat untuk menyatukan data baik dari perencanaan, keuangan, sampai dengan pelaporan daerah seluruh Indonesia.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berfungsi untuk menjaga konsistensi perencanaan awal sampai pada penganggaran, atau harus konsisten dalam program kegiatan, sub kegiatan, target, indikator dan tujuan sasaran dalam perencanaan maka dibutuhkan sebuah sistem agar tidak ada lagi penambahan program, pengurangan program ketika semua sudah diinput dari perencanaan awal dengan batas waktu yang di tentukan dalam perencanaan pembangunan, dengan harapan bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah menggunakan online akan memberikan kemudahan bagi setiap instansi dan dapat terlaksana dengan transparansi.

Namun atas penerapan SIPD ini masih menuai kendala, hasil penelitian dari Nasution,dkk (2021) menyatakan penerapan SIPD dalam penyusunan Dokumen RKPD cenderung kurang efektif, adapun hambatan yang ditemukan dalam penggunaan SIPD yaitu penginputan program, kegiatan maupun sub kegiatan masih terkendala dikarenakan server yang belum optimal. Dione (2020) menyatakan bahwa sumber daya yang ada dalam mendukung implementasi kebijakan SIPD masih belum memadai terutama jika berdasarkan kuantitas dan kualitas staf, jumlah dan kemampuan staf masih belum memadai.

Kendala ini juga terjadi di Pemerintahan Kota Sibolga, dalam hal penggunaan akun oleh masing – masing *stakeholder*. Fenomena yang terjadi di Pemerintahan Kota Sibolga akun yang dibagikan kepada eselon 3 dalam hal ini kepala bidang atau kepala bagian sebagai penanggung jawab untuk penginputan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlaksana. Eselon 3 selaku penanggung jawab medelegasikannya ke eselon 4 yaitu kepala seksi maupun ke staf, sehingga mengakibatkan terjadinya perencanaan yang salah yaitu kesalahan dalam menentukan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang mendukung kinerja OPD sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Fenomena inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian dengan Judul “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pemerintah Kota Sibolga.”

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Sibolga?
2. Bagaimanakah efektifitas dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam mendukung Perencanaan pada Pemerintah Kota Sibolga?

Batasan Masalah

Penelitian ini di batasi pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu informasi pembangunan daerah pada Pemerintah Kota Sibolga

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Sibolga
2. Untuk menganalisis Efektifitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada perencanaan Pemerintah Kota Sibolga

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai tujuan guna membenarkan alur tahapan penataan dokumen rencana daerah yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan.

Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara professional seperti yang terdapat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Selain itu, adanya tuntutan dalam proses perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta keterbukaan informasi publik membuat Pemerintah terpacu untuk berinovasi dalam perencanaan pembangunan. Sehingga terbitlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur teknis pengelolaan SIPD yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini. Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis SPBE terpadu nasional sangat penting untuk diwujudkan menuju Good Governance dan menghasilkan satu data Indonesia yang

akurat dan terintegrasi mulai daerah hingga pusat.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Teori implementasi Edward III (dalam Citra, 2023) bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Birokrasi.

1. Komunikasi merupakan variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan surat implementasi serburah kebijakan. Surat informasi dapat diketahui oleh para pembuat kebijakan apabila terdapat komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.
2. Sumber daya merupakan syarat penting agar surat implementasi atau organisasi dapat berjalan dengan baik. Edward III mengatakan bahwa sumber daya bisa diukur melalui aspek kercurupan yang meliputi kersasian serta kejelasan. Terdapat empat indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
3. Disposisi (Perilaku), Perilaku dari pelaksana kebijakan juga mempunyai peran penting dalam merencanakan implementasi kebijakan agar berjalan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Awarth et al., 2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi disposisi dalam

implementasi kebijakan yaitu Pengangkatan birokrasi (Pelaksanaan Kebijakan), Insentif.

4. Struktur Birokrasi, Implementasi kebijakan menjadi tidak efektif apabila struktur birokrasi tidak kondusif terdapat jalannya implementasi kebijakan. Faktor yang mempengaruhi variabel struktur birokrasi menurut Edward III (1980) menjelaskan dalam (Winarno, 2014) yaitu r : SOP dan Fragmentasi

Efektivitas perencanaan

Efektivitas ialah sesuai ukuran yang melaporkan seberapa jauh sasaran (kuantitas, mutu serta waktu) yang sudah dicapai, berkaitan dengan perbandingan yang sebelumnya kurang efisien namun dengan hal ini, dapat berjalan lebih efektif dari sebelumnya.

Terori T.Hani Handoko yang menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator dalam mengukur seberapa variabel efektivitas antara lain :

1. Kegunaan meliputi Fleksibel dan Stabil

Fleksibel adalah seberapa mudah surat layanan atau sistem dapat diadaptasi atau disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Stabil adalah seberapa besar surat layanan dapat diandalkan dan beroperasi secara konsisten dengan kinerja yang baik dan dapat menangani volume transaksi yang tinggi dan memastikan tidak ada masalah teknis lainnya yang dapat menghambat surat kegiatan dari penggunaan sistem layanan.

2. Keterpatan dan Objektivitas meliputi Kejelasan, Akurasi, serta Keringasan Untuk efektivitas dari surat program dapat berdasarkan melalui

kerakuratan atau keterpatan dan objektivitas, mernjurkan cara mernetapkan efektivitas itu dengan mernhitung kerjelasan, akurasi, serta keringkasannya.

Kejelasan adalah seberapa jelas surat layanan atau sistem dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak yang bersangkutan.

Akurasi mengacu pada kemampuan sistem yang digunakan untuk melakukan proses transaksi dengan benar dan akurat.

Keringasan mengacu pada kemampuan menyajikan informasi dan tampilan yang sederhana dan mudah dibaca.

3. Ruang lingkup meliputi Kelengkapan, Kohersensi, serta Konsistensi

Mernetapkan efektivitas surat program diperlukan syarat yang terpenuhi baik dari prinsip-prinsip kelengkapan, kohersensi, serta konsistensi demi meningkatkan keberhasilan program.

Kelengkapan adalah seberapa lengkap surat layanan atau sistem dalam menyediakan fitur dan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengguna.

Kepaduan adalah seberapa baik surat layanan atau sistem dalam menyatukan seluruh bagian atau komponennya menjadi satu kesatuan yang utuh.

Konsistensi adalah salah satu kriteria yang mernjurkan tidak berubah-ubah surat layanan atau sistem dalam memberikan layanan yang diinginkan oleh pengguna.

4. Permbiayaannya meliputi waktu, usaha, dan aliran emosional

Indikator Efektivitas dapat berdasarkan dari pembiayaan, jika surat program yang akan dilaksanakan dapat meminimalisir tingkat pengeluaran pembiayaan dari sumbernya maka dapat dikatakan efektif, dalam konteks ini, biaya yang dimaksud adalah biaya yang terkait dengan penggunaan waktu dan usaha.

Waktu adalah seberapa lama surat layanan atau sistem memakan waktu untuk memberikan layanan yang diinginkan.

Usaha adalah seberapa besar tenaga atau usaha yang harus dikerahkan oleh seseorang untuk menggunakan surat layanan atau sistem agar dapat optimal.

5. Akurabilitas meliputi keamanan serta penanganan

Keramanan serta Indikator Efektivitas dapat berdasarkan dari keamanan serta penanganan, jika surat metode yang akan digunakan dapat terjamin tingkat keramanannya penanganan maka dapat dikatakan efektif penanganan.

Keramanan merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi informasi dari bahaya, ancaman, untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, mengurangi kerentanan, dan melindungi aset nilai-nilai yang berharga.

Penanganan, di sisi lain merujuk pada proses atau tindakan yang dilakukan untuk menangani situasi atau masalah tertentu yang muncul.

6. Keterpatan waktu meliputi keterpatan waktu

Keterpatan waktu adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas atau kewajiban pada waktu yang telah ditentukan atau diharapkan. Hal ini melibatkan kemampuan seseorang atau surat sistem untuk mematuhi jadwal atau tenggat waktu

Kurniawan (2019) efektivitas dari sistem informasi dapat diukur dari beberapa indikator ini, sebagai berikut :

1. Matur Sistem (*System Quality*)

Matur sistem atau kualitas sistem yakni properti dari data intrinsik sistem yang dipakai, yang mana mengacu pada seberapa efisien dan efektifnya sebuah hardware atau software yang dipakai serta prosedur kebijakan program dan sistem data bisa memenuhi permintaan data penggunaannya. dapat ditetapkan melalui kemudahan penggunaan, dan fungsional.

2. Matur Informasi (*Information Quality*)

Dalam Indikator efektivitas sebuah sistem dapat berdasarkan dari *Information Quality* yang mana para informan dapat manfaat dari sistem informasi tersebut, dan diketahui serlakur matur informan yang dalam indikator efektivitas mencakup akurasi, keterpatan waktu, kelengkapan, relevansi, serta konsistensi merupakan seluruh metode untuk mengukur matur data dari keefektifan sebuah sistem perangkat yang dipakai .

3. Matur Pelayanan (*Service Quality*)

Matur Pelayanan adalah kualitas dari pelayanan pada software yang

dipakai, serjaurh mana perrangkat tersserburt dalam merlayani pernggurnanya, akankah dapat diandalkan murtur dari perrangkat urnturk perngguna dalam merlaksakan aktivitas.

4. Yang mernggunakan (*Urserr*)
 Dalam *Urserr* dapat dilipurti oleh Frerkurernsi perngguna, durrsasi perngguna, jurmlah aksers, pola perngguna, dan kerterrganturngan biasanya digurnakan urnturk mernggurkurr perngguna sistem
5. Kerpurasan Perngguna (*urserr satisfaction*)
 Kerpurasan permakaian yakni serburah bernturk perncapaian dari bagaimana sistem ataur perrangkat yang dipakai, berddasarkan serjaurh mana erferktivitas permakaiannya, dari lima komponern yang ditertap yaitur, kontern (conternt), kerakurratan (accurracy), format (format), murdah dioperrasikan (erasy to urser), dan nyata dalam pemberrian informasi (timerlinerss).
6. Dampak Organisasi (*Organizational Impact*)
 Dampak Perngguna yaitur dampak dari individual ataurpun dampak organisasi yang mernggunakan.

Indikator ataur asperk Erferktivitas yang dikermurkakan oleh Durncan dalam Wurrara (2022) antara lain :

1. Pncapaian Turjuran
 Kerserlurrurhan urpaya pncapaian turjuran harurs dipandang serbagai suratur prosers. Olerh karena itur, agar pncapaian turjuran akhir sermakin terrjamin, diperrlurkan perntahapan, baik dalam arti perntahapan

perncapaian bagian-bagiannya maurpun perntahapan dalam arti perriodisasinya. Pncapaian turjuran terrdiri dari indikator, yaitur kurrurn waktur pncapaian diternturkan, pncapaian sasaran targert kongkrit dan dasar hurkurrn.

2. Intergrasi
 Perngkurran terrhadap tingkat kermampuan suratur organisasi urnturk merlakurkan kergiatan dari program kerrja yang telah diserpakati dan merngadakan sosialisasi dangan pihak lain. Intergrasi terrdiri dari indikator, yaitur proserrdur dan prosers sosialisasi.
3. Adaptasi errat kaitannya derngan penyersuraian terrhadap hal- hal yang barur

4. Kerangka Berrpikir



Gambar 2.1 Kerrangka Berrpikir

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Pernerlitan ini mernggunakan mertoder pernerlitan kuralitatif derskriptif derngan pernderkatan sturdi kasurs karena pernerlitan ini bernturjuran urnturk mernerliti pola pikir, niat dan tindakan dari informan yang berrada di lingkurngan Dinas PUrPR, dan BAPPErDA atas fernomerna yang terrjadi, yang kermurdian diderskriptifkan.

Objek Penelitian

Obyerk dalam pernerlitan ini terrfokurs kerpada Dinas PUrPR, dan

BAPPErDA terkhursurs pada Implmerntasi SIPD terhadap Erferktivitas Perrencanaan.

Bidang serrta Kepala Surb Bagian Program dan Kerurangan pada Dinas PUrPRdan BAPPErDA Kota Sibolga.

Operasional Variabel

Variaberl ataur paramerterr yang akan diamati dan diurkurr dalam pernerlitan ini, dijelraskan pada Taberl 3.1 serbagai berrikurt:

Taberl 3.1 Operrasional Variaberl Pernerlitan

No	Variabel	Dunemi	Indikator
1	Implementasi SIPD (Winarno etal, 2019 dan Edward III, dalam Citra 2023).	Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
		Sumber daya	1. Staf 2. Infocmasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
		Disposasi	1. Pengangkatan Birokrasi 2. Insentif
		Struktur Birokrasi	1. SOP 2. Fragmentasi
2	Efektivitas Perrencanaan (Duncan dalam Wurara 2022)	Pencapaian Tujuan	1. Lama Waktu Pelaksanaan 2. Pencapaian sasaran Target 3. Dasar Hukum
		Integrasi	1. Prosedur 2. Proses Sosialisasi
		Adaptasi	1. Penyesuaian Baru

Sumber dan Teknik pengumpulan data

Sumber data

Surberr data yang digurnakan dalam pernerlitan ini adalah data primerr dan data serkurderr.

1. Data Primerr

Mernurrurt Nurvitasari ert al., (2019) data primerr merrupakan data yang diperrollerh langsung dari surbjerk pernerlitan berrrupa intervierrw ataur perngamatan terhadap objek terterntur.

Data primerr dalam pernerlitan ini yaitur data yang berrasal dari surberr asli ataur surberr perrtama yang diperrollerh merlaluri wawancara langsung kepada informan yang terrkait derngan masalah pernerlitan yaitur , Perjabat yang merndurduki Jabatan Serkretaris, Kepala

2. Data Serkurderr

Mernurrurt Nurvitasari ert al., (2019) data serkurderr merrupakan data yang dicatat ataur diperrollerh dari pihak lain.

Data serkurderr dalam pernerlitan ini adalah surberr data yang tidak langsung didapatkan dari objek merlaluri wawancara, yaitur data yang diperrollerh dari dokurmern-dokurmern, literaturr, serrta surberr lainnya serpertri Urndang - Urndang dan Perraturan yang berrhurburgnan derngan SIPD serrta perrencanaan Perrbanguan, dokurmern ataur surrat yang diterbitkan oleh OPD yang dapat merndurkurng pernerlitan ini.

Teknik pengumpulan data

Terknik perngurmpuran data yang digurnakan dalam pernerlitan ini adalah :

1. Wawancara (*Interrvierrw*), Pernerliti mernggurnakan wawancara merdalam sercara terstruktur kepada berberrapa informan yang berrada di lingkurngan Dinas PUrPR dan BAPPErDA Kota Sibolga terrkait derngan masalah pernerlitan.
2. Obserrvasi, Pernerliti mernggurnakan pancaindra dan merlaksanakan perngamatan sercara langsung di termpat pernerlitan. Mertoder perngurmpuran data ini dipilih karena pernerlitan terribert berrkaitan derngan perilaku manursia, terrutama dalam proser kerja urnturk menyururn serburah rerncana.
3. Sturdi Dokurmern merrupakan cara perngurmpuran data dan terlaah purstaka, yang mana dokurmern dokurmern yang dianggap mernurnjang

dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti buku-buku daerah (RPJMD, RKPD, RERNTA, RERNTA); laporan, jurnal, literatur, majalah dan peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan undang-undang yang mendasar serta dokumen yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan proses perencanaan pembangunan).

Berikut daftar pertanyaan kuratorial yang ditunjukkan kepada informan, dijelaskan pada Tabel 3.3 di bawah ini

4. Dokumentasi

Dokumen yang diteliti dapat berupa buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan fenomena dan masalah yang dipelajari. Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk menggali data berupa dokumen terkait Perencanaan, yang berhubungan dengan Komponen Implementasi SIPD dan Efektivitas Perencanaan yang bersumber dari objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata, gambar, dan bukan angka.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pengumpulan data, dilakukan untuk memperoleh informasi yang

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

b. Data Reduction (Reduksi Data), Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Data Display (Pernyajian Data) bertujuan agar data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

d. Teknik Pengolahan data Pengolahan data dilakukan agar data yang telah didapatkan lebih mudah untuk dianalisis dan kemudian dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dengan Analisis Statistik Deskriptif

d. Menarik Kesimpulan, yang masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak didukung dengan bukti yang kuat sampai pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang benar dan konsisten saat peneliti melakukan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Profil lokasi penelitian

Tindak lanjut dari terbitnya peraturan daerah Kota Sibolga Nomor 1 tahun 2017 oleh pemerintah Kota Sibolga menetapkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kerdujukan, Sursunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sibolga mengamanatkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sibolga mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum. Demikian halnya Pemerintah Kota Sibolga menetapkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kerdujukan, Sursunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga mengamanatkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan.

Deskripsi informan

Dalam penelitian ini yang dimaksud informan adalah Pejabat Eselon III dan Eselon IV pada BAPPERDA, Dinas PURPR dengan jabatan sebagai Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubang Program dan Keruangan. Penetapan informan ini didasarkan kepada jabatan informan yang berhubungan dengan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada

BAPPERDA, Dinas PURPR Kota Sibolga yang memiliki informasi tentang implementasi SIPD dan memiliki kewenangan dalam pengelolaan SIPD sebagaimana diatur dalam Permenagri Nomor 70 Tahun 2019.

Pengolahan data

Hasil Pengolahan Data Kuisisioner

Adapun hasil rekapitulasi jawaban kuisisioner antara lain :

1. Variabel Implementasi SIPD bahwa Pemerintah Daerah pada Dinas PURPR dan Bapperda Kota Sibolga telah baik (tinggi) yang berarti memenuhi sebagian besar dari indikator Komunikasi, Disposisi dan Struktur Organisasi bahwasanya Implementasi SIPD Dapat dipahami, Dapat Dibandingkan, dapat dijadikan sebagai dasar penerapan Implementasi SIPD di pemerintah Kota Sibolga, kondisi ini didukung oleh hasil penelitian dari Citra (2023) yang menentukan keberhasilan surat implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Birokrasi. BAPPERDA dan Dinas PURPR Kota Sibolga telah memenuhi indikator dari Implementasi SIPD yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan struktur Birokrasi, kondisi ini didukung oleh hasil penelitian dari Winarno et al, (2019) Implementasi SIPD adalah penerapan sistem pernodokurmerntasian dan pengolahan data perencanaan daerah yang menyajikan informasi kepada publik.
2. Variabel efektivitas Perencanaan bahwa implementasi SIPD yang

dilaksanakan OPD dapat dimanfaatkan dalam efektivitas perencanaan pada Dinas PUPR dan BAPPEDA Kota Sibolga dikarenakan sesuai dengan pengolahan data secara keseluruhan memenuhi indikator Pencapaian Turunan, Integrasi dan Adaptasi ini sejalan dengan hasil Penelitian dari Wurrara (2022) bahwa implementasi SIPD sangat membantu dalam penyusunan dokumen.

Pembahasan

Implementasi SIPD

Pemerintah memiliki harapan yang sangat besar kepada setiap Perangkat Daerah (PD) untuk mengimplementasikan program SIPD. Namun, kenyataannya masih terdapat kendala pada kantor Dinas PUPR dan BAPPEDA dalam mengimplementasikan program SIPD. Terdapat empat (4) faktor yang dapat menurunkan keberhasilan implementasi SIPD, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Pada Pemerintah Kota Sibolga, komunikasi implementasi program SIPD telah dilakukan sosialisasi dengan mengundang setiap perwakilan Organisasi Perangkat Daerah. Sosialisasi ini dilakukan pemerintah kota guna memperlakukan penggunaan program SIPD terhadap perangkat daerah setingkat walikota hingga kecamatan. Observasi awal penelitian, penelitian merduga tidak terjadi hambatan pada komunikasi dikarenakan, komunikasi antara Pemerintah Kota dan seluruh OPD di Pemerintah Kota Sibolga terkursus dengan Dinas PUPR dan

BAPPEDA Kota Sibolga dengan instansi di bawahnya sudah terjalin dengan baik.

b. Sumber Daya

Sumber daya sangat penting dalam melaksanakan implementasi program SIPD. Pada Dinas PUPR menunjukkan bahwa sumber daya (Pegawai) yang diberi tugas untuk mengumpulkan, mengisi dan memvalidasi tidak berkompeten dalam menjalankan tugasnya ini dikarenakan staf yang ada pada Dinas PUPR tidak mempunyai skill dalam pengoperasian komputer dan mereka tidak terlalu paham dengan SIPD. Staf pada Dinas PUPR lebih sering ke lapangan untuk mengerjakan Pembangunan pada pemerintahan Sedangkan pada BAPPEDA staf sangat berkompeten di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengoperasian di dalam SIPD staf di BAPPEDA sudah sangat memahami dengan aplikasi SIPD dan memahami perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan BAPPEDA merupakan TAPD perencanaan yang mempunyai Akun di SIPD.

c. Disposisi

Terjadinya mutasi yang sering dan tidak sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya merupakan faktor penghambat tidak optimalnya pengimplementasian SIPD. Pelaksanaan program SIPD pada Dinas PUPR dan BAPPEDA telah dilakukan tugasnya dengan sangat baik dengan serperhati, agar implementasi SIPD berjalan sesuai harapan.

d. Struktur Birokrasi

Pada Pemerintah Kota Sibolga tidak terjadi kendala apapun dalam struktur

birokrasinya, dikarenakan dalam Permerndagri telah dijelaskan tim pelaksana (perngelola) SIPD beserta kerbuturhan-kerbuturhan data yang diperlukan. Salah satu upaya Pemerintah Kota Sibolga agar implementasi SIPD ini berjalan dengan baik yaitu menghimbau pada seluruh Erserlon 2, Erserlon 3 dan Erserlon 4 agar berkomitmen dalam mendukung implementasi program SIPD ini, dari hal terkecil seperti ketersediaan data-data pendukung dan akurasi data pendukungnya. Mengingat tidak akan ada gunanya mempersiapkan hal-hal yang besar terkait implementasi program SIPD, kalau dari hal yang terkecil saja tidak diperhatikan atau bahkan diabaikan, pasti implementasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Efektivitas Perencanaan

a. Pencapaian Turjuran

Pencapaian turjuran merupakan steress adalah keseluruhan upaya pencapaian turjuran harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian turjuran akhir semakin terjamin, diperlukan perantaraan, baik dalam arti perantaraan pencapaian bagian bagusnya maupun perantaraan dalam arti periodisasinya. Pencapaian turjuran terdiri dari indikator, yaitu lama waktu pelaksanaan, pencapaian sasaran dan dasar hukum.

Variabel pencapaian turjuran dalam penyusunan Dokumen perencanaan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja OPD selanjutnya karena dalam penyusunan rencana kerja berpedoman pada RPJMD Kota Sibolga tahun 2021-2026 yang telah menuangkan sasaran dan target kinerja.

Namun pada indikator dasar hukum belum optimal untuk menunjang proses perencanaan sesuai Koderfikasi, klasifikasi dan nomerklaturr dikarenakan terjadinya perubahan aturan hukum yang sangat cepat. Kondisinya telah 3 kali terbit aturan Kerpmer (kerpurturan mernteri) yaitu Kerpmer 050- 3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi permurtakhiran klasifikasi, koderfikasi, dan nomerklaturr perencanaan pembangunan dan keruangan daerah, Kerpmerndagri 050- 5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi permurtakhiran klasifikasi, koderfikasi dan nomerklaturr perencanaan pembangunan dan keruangan daerah, Kerpmerndagri 900.1.15.5- 1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Kerpurturan dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi permurtakhiran klasifikasi, koderfikasi dan nomerklaturr perencanaan pembangunan dan keruangan daerah.

b. Integrasi

Integrasi, yaitu pengurutan terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Sosialisasi sebagai salah satu upaya untuk memberikan informasi atas perencanaan pembangunan telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Sibolga sebagai lining sektor dan wali data dalam penyusunan perencanaan, termasuk di dalamnya untuk penyampaian informasi atas pemanfaatan SIPD untuk penyusunan perencanaan Pembangunan.

c. Adaptasi

Adaptasi erat kaitannya dengan penyusunan terhadap hal-hal yang baru, bertukar penyusunan yang harus diperhatikan pemerintah kota Sibolga adalah terobosan pemerintah pusat dalam hal upaya sinergitas antara pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan maka pemerintah pusat menyusun perencanaan pembangunan melalui Dokumen RPJPN maupun RPJMN yang kiranya dapat diselaraskan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan melalui Dokumen RPJPD maupun RPJMD.

Hubungan Implementasi SIPD dan Efektivitas Perencanaan

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap efektivitas perencanaan pembangunan di Pemerintah Kota Sibolga, aplikasi ini dinilai inovatif dan mampu meningkatkan efisiensi penyusunan perencanaan karena berbasis elektronik dan terintegrasi dengan pusat dan daerah. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti belum terpenuhinya indikator-indikator efektivitas akibat dasar hukum yang sering berubah secara cepat, pelatihan rutin bagi sumber daya manusia, serta keterbatasan sarana prasarana. Aplikasi ini meskipun sangat membantu dibandingkan metode manual, masih membutuhkan penyusunan dan dukungan yang lebih baik agar dapat mencapai efektivitas optimal sesuai teori Durcan dalam Sterrs (2012).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Kota Sibolga, dengan kondisi sebagai berikut:

1. Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, SIPD sudah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan fungsinya. SIPD dapat mengidentifikasi setiap proses penyusunan dokumen perencanaan, baik dalam pengumpulan data perencanaan, penginputan data dan urusan masyarakat dan Pokok-pokok Pikiran Dewan hingga tahap pelaporan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, baik dari staf (pegawai) yang tidak kompeten dan tidak mempunyai Skill dalam penginputan SIPD dan Jaringan yang kurang stabil.
2. Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap efektivitas perencanaan pembangunan di Pemerintah Kota Sibolga, bahwa SIPD merupakan aplikasi yang dinilai inovatif dan dapat meningkatkan efisiensi penyusunan perencanaan karena berbasis elektronik dan terintegrasi dengan pusat dan daerah, meskipun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, seperti indikator efektivitas yang dipengaruhi oleh perubahan dasar hukum yang

begitu cepat, pelatihan rutin bagi sumber daya manusia, serta keterbatasan sarana prasarana.

Saran

Guna mengoptimalkan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat beberapa saran yang diberikan kepada Pemerintah Kota Sibolga secara antara lain :

- a. Dalam pemerataan dan redistribusi pegawai pada jajaran OPD yang berada di bawah Pemerintahan Kota Sibolga, sebaiknya Badan Kerjasama Daerah Kota Sibolga merubah *mindset* dalam manajemen kerjasama dan mempersuainya dengan keributan tenaga, frekuensi beban kerja di masing – masing OPD dengan menerapkan prinsip “*The right man on the right place*”, yang dapat meminimalisir tingkat kesalahan dan keterlambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Desentralisasi server dapat membantu meringkas akses web yang lambat dengan mendistribusikan beban trafik secara merata ke berbagai server di lokasi yang berbeda. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kelebihan beban pada satu server tunggal dan meningkatkan kinerja serta kerandalan sistem secara keseluruhan.

Pemerintah Kota Sibolga melalui BAPPEDA harus sering melaksanakan Bimtek Kerdaerah-ke daerah untuk menambah pengetahuannya tentang penyusunan Dokumen Perencanaan dan sering berkoordinasi ke Pemerintah Pusat baik melalui media komunikasi dan media virtual ZOOM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsana, I Purwati. 2016. *Etika Profesi Insinyur (Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana Teknik*. Yogyakarta: Derapublish.
- Christo Vorando Amalo. 2019. *Efektifitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Naikotern II Kecamatan Kota Raja Kota Kurpang*. Jurnal Inovasi Kebijakan Vol IV
- Dyer, Thomas R. 1975. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliff, N.J.: Prentice-Hall 2nd ed.
- Erdarwati III, Geroger C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Inc.
- FM Ritonga, J Nasution. 2021. *Analisis Pemahaman Pegawai Dalam Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keruangan (Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas Utara)*. Jurnal Merka Vol. 2
- Frans Diner, Urtami Faradina (2020). *Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan koordinasi pembangunan di daerah (Studi tentang penerapan SIPD pada Bappeda Bengkurl)*. Jurnal kebijakan pemerintahan 3(1).

- Grindler, Merrilerer S. 1980. *Politics and Policy Implmerntation in Ther Third World*, Princenton Urniverrrsity Prerss, Nerw Jerrsey.
- H. Tachjan. 2006. *Implmerntasi Kerbijakan Purblik*. Bandurng: APII Bandurng
- Jaya, L. M. I Mader. 2020. *Mertoder Pernerlitian Kurantitatif dan Kuralitatif*. Yogyakarta: QUrADRANT.
- Kementerian Dalam Negeri. 2017. Perraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahurn 2017 tertng Tata cara perrencanaan, perrngendalian dan ervalurasi perrbangunan daerrah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 713. Kemendagri. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2019. Perraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahurn 2019 tertng Sistem Informasi Permerrintahan Daerrah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1114. Kemendagri. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2019. Perraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahurn 2019 tertng Klasifikasi, Koderfikasi dan Nomernklaturr Perrencanaan Perrbangunan dan Kerurangan Daerrah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447. Kemendagri. Jakarta.
- Krismiaji. 2020. *Sistern Informasi Akurntansi*. Malang: UrPP STIM YKPN.
- Kurnarjo.2002. *Perrencanaan dan Pengerndalian Program Perrbangunan*. Perrnrrbit Urniverrrsitas Indonersia. Jakarta.
- Murlyadi, Derddy. 2015. *Sturdi Kerbijakan Purblik dan Perlayanen Purblik: Konserp dan Aplikasi Proser Kerbijakan Purblik dan Perlayanen Purblik*. Bandurng: Alfaberta CV
- Nasurtion, M. I., & Nurrwani M. (2021). Analisis Pernerrapan Sistem Informasi Permerrintah Daerrah (SIPD) pada Badan Pengerlola Kerurangan Dan Asert Daerrah (BPKAD) Kota Merdan. *Jurnal Akurntansi Dan Kerurangan*, 9(2), 109–116.
- Nurrkholis dan Moh. Khursaini. 2019. *Perrngangan Serktor Purblik*. Malang: UrB Prerss.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Perraturan Permerrintah Nomor 18 Tahurn 2016 tertng Perrangkat Daerrah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2018. Perraturan Prersidern Nomor 95 Tahurn 2018 tertng Sistem Permerrintahan Berrbasis Erlerktronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2019. Perraturan Prersidern Nomor 39 Tahurn 2019 tertng Satur Data Indonersia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 112. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Powa, Alan. 2021. *Perrmanfaatn Terknologi dan Informasi di Dinas Komurnikasi dan Informatika Statistik dan Perrсандian di Kaburpatern Minahasa Ternggara*. JURNAL GOVERRNANCEr Vol.1, No. 2, 2021.
- Rainerr, R. Kerlly, and Princer Brad. 2020. *Introdurction to Information Systemr*:

- Supporting and Transforming Business Ecosystems*. Asia: Hoboken
Ratnaningtyas, Er.M., Syafrurddin, Saputra,
Erdi. Surliwati, Dersi. Taurfiq, Berkty.
Nurgroho, Ari. Karimurddin.
Habiburllah, Murhammad. Aminy.
Saputra, N. Khaidir & Jahja, A.S.
2022. *Metodologi Penelitian
Kualitatif*. Acerh: Yayasan Penerbit
Murhammad Zaini.
- Siti Fatimah. 2019. *Teori Perencanaan*.
Makasar : Urwais Inspirasi Indonesia
- Turmija, Akhmad Zakky Ramadhan. 2023.
*Efektifitas Perencanaan Anggaran
dalam sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD) Kabupaten Gresik
Provinsi Jawa Timur*. Jurnal
Ekonomi dan Keruangan Publik 10
(2)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,
tentang Pemerintahan Daerah.
- Winarno et al. 2019. *Implementasi Sistem
Informasi Pembangunan Daerah
di Kabupaten Tanggung*. Prosiding
PKM-CSR Vol.2